

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan nasional sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Berbagai kegiatan pembangunan nasional diarahkan kepada pembangunan yang merata ke setiap daerah yang cenderung masih memiliki kelemahan dalam penerimaan pendapatan. Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan yang lebih luas. Seperti tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya otonomi daerah memunculkan dimensi baru berupa Desentralisasi dan Dekonsentrasi (Zuwesty 2015). Menurut UU No.32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Pelaksanaan desentralisasi fiskal memberikan peluang pada pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya secara efektif, dengan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan disektor publik. Untuk itu harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai yang berasal dari PAD.

Sebagian besar daerah mengalami masalah keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, karena sumber penerimaan PAD potensinya rendah. Oleh sebab itu setiap pemerintah daerah berupaya untuk dapat meningkatkan perekonomian daerahnya sendiri termasuk meningkatkan perolehan PAD dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

PAD sebagai salah satu penerimaan daerah, mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diatur oleh UU No. 32 tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan salah satu tolok ukur dalam pelaksanaan pembangunan daerah, akan tetapi PAD tersebut masih belum cukup untuk membiayai pembangunan apabila dilihat dari proporsi PAD terhadap APBD. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi PAD diantaranya Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk, dan Inflasi.

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan harkat, martabat, kualitas, serta kesejahteraan segenap lapisan masyarakat. Dalam kerangka itu pembangunan harus dipandang sebagai suatu rangkaian proses pertumbuhan yang berjalan secara berkesinambungan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Pembangunan daerah yang

dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, mandiri dan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan daerah lain yang lebih maju dan sekaligus secara agregat meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara secara adil dan merata. Pemberian otonomi kepada daerah akan menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan peran nyata dan kemandirian daerah dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata (Soemitro, 2000 dalam Gde Bhaskara dan A.A Bagus, 2014).

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor penentu adanya disparitas pendapatan asli daerah. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan, dan bukan satu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat merangsang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Gde Bhaskara dan A.A Bagus, 2014).

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Proporsi pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional (GNP) adalah

suatu ukuran terhadap kegiatan pemerintah dalam suatu perekonomian (Mangkoesoebroto, 1998 dalam Sitaniapessy, 2013).

Dengan semakin pesatnya pembangunan bidang ekonomi, menuntut tersedianya data statistik ekonomi yang beraneka ragam, tepat waktu, akurat dan lengkap. Maka untuk memenuhi salah satu tuntutan data yang beraneka ragam tersebut Tim Indeks Harga Konsumen Kabupaten Boyolali mengupayakan tersedianya data Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi. Data Indeks Harga Konsumen merupakan indikator ekonomi makro yang cukup populer untuk memberikan gambaran tentang laju inflasi suatu wilayah/daerah karena kelengkapannya serta langsung berhubungan dengan konsumen, sehingga dapat menggambarkan pola konsumsi di masyarakat. Dari hasil penghitungan Indeks Harga Konsumen banyak hal yang dapat diungkapkan untuk membuat analisis sederhana tentang sekilas kegiatan ekonomi suatu wilayah / daerah pada periode tertentu. Angka Indeks Harga Konsumen merupakan angka indeks yang menggambarkan perubahan harga berbagai barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat secara umum atau merupakan angka yang menggambarkan perbandingan harga konsumen pada suatu periode dengan periode waktu tertentu. Periode waktu tertentu yang ditentukan yang digunakan sebagai dasar pembandingan disebut sebagai periode dasar atau tahun dasar. Indeks Harga Konsumen periode tahun dasar ditentukan sama dengan seratus. Bila Indeks Harga Konsumen pada suatu waktu lebih besar dari seratus

berarti secara makro terjadi kenaikan harga barang dan jasa, dan jika Indeks harga Konsumen menunjukkan angka kurang dari seratus maka pada periode tersebut telah terjadi penurunan harga barang dan jasa terhadap harga pada periode dasar. Dari perubahan angka Indeks Harga Konsumen dapat dihitung laju inflasi yang menggambarkan naik turunnya harga barang dan jasa. Inflasi yang tinggi menunjukkan terjadinya kenaikan harga barang dan jasa yang tinggi pula yang mengakibatkan turunnya kemampuan daya beli masyarakat atau dengan kata lain terjadi penurunan nilai mata uang. Jika terjadi inflasi yang tinggi maka yang dirugikan tidak hanya masyarakat/penduduk penerima upah/gaji tetap dan masyarakat kecil saja tetapi juga berpengaruh negatif bagi produsen industri atau pengusaha di bidang lain. Efek negatifnya juga akan terasa dan berpengaruh terhadap prospek penanaman modal/investasi baik domestik maupun asing (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Boyolali).

Adanya aktifitas penduduk pada perekonomian menyebabkan gejolak ekonomi secara menyeluruh atas permintaan barang dan jasa yang berlebihan biasanya disebut inflasi. Adanya inflasi di Kota menggambarkan adanya gejolak ekonomi, apabila inflasi tersebut dibiarkan begitu saja tanpa dikendalikan akan berdampak pada perekonomian, karena inflasi yang baik kurang dari 10 % apabila inflasi melebihi dari 25% akan mengakibatkan nilai barang tinggi dan berdampak pada nilai tukar rupiah yang akan semakin menurun (Iwan Susanto, 2014).

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Bhaskara dan Bagus (2014) menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Gitaningtyas dan Kurrohman (2014), Makdalena, Vikie, dan George (2015) menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Pada penelitian Sitaniapessy (2013) hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dalam penelitian Iwan (2014) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian ini mengembangkan dari penelitian terdahulu yang dilakukan Gde Bhasakara dan A.A Bagus (2014), adapun perbedaan penelitiannya adalah pada tempat penelitian. Gde Bhaskara dan A.A Bagus melakukan penelitian pada kota Denpasar, sedangkan penelitian ini pada kota Boyolali. Dalam penelitian Gde Bhaskara dan A.A Bagus menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah meliputi PDRB, jumlah penduduk dan jumlah wisatawan, sedangkan dalam penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah yang meliputi pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, dan inflasi.

Pentingnya dilakukan penelitian ini karena peneliti ingin menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah, faktor-faktor tersebut meliputi pengeluaran pemerintah, produk domestik regional bruto, jumlah penduduk dan inflasi di Kabupaten Boyolali.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada DPPKAD, BAPPEDA, dan BPS Kabupaten Boyolali tahun 2006-2015).**”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?
2. Apakah Jumlah penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?
3. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latarbelakang dan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pendapatanasli daerah.
2. Untuk menganalisis apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

3. Untuk menganalisis apakah inflasi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya :

1. Manfaat Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan khususnya pemerintah daerah yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah dalam upaya mendorong perekonomian daerah sehingga dapat tercapai kesejahteraan yang adil dan makmur.

2. Manfaat Bagi Peneliti

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap mampu menggunakan keilmuan yang selama ini didapat dibangku perkuliahan untuk diterapkan pada suatu studi kasus perekonomian yang telah dipilih. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi pembelajaran dalam melakukan analisis serta memberi solusi terhadap permasalahan-permasalahan riil lainnya.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran penelitian yang lebih jelas dan sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi dasar analisis penelitian, meliputi : variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah, variabel independen yaitu pendapatan domestik regional bruto, pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk dan inflasi, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran teoritis.

BAB III METODA PENELITIAN

Bab ini memuat uraian tentang desain penelitian; populasi, sampel, dan metode pengambilan sampel; data dan sumber data; definisi operasional variabel dan pengukurannya; dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum hasil penelitian, pengujian kualitas pengumpulan data, hasil pengujian asumsi dan hasil pengujian hipotesis.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang daftar pustaka dan lampiran jurnal yang diajukan sebagai pedoman.